

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali)

Anak Agung Istri Andriyani
Akademi Militer Magelang
Email : yuarini@gmail.com

Edhi Martono
Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada
Email: edhi.martono@ugm.ac.id

Muhamad
Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Email: drmuhammad@ugm.ac.id

ABSTRACT

The objective of this research was to understand the process of community empowerment through the development of tourism village in Penglipuran's Tourism Village and its implications related to the village's socio-cultural resilience. The research had led to the finding that the process of community empowerment consisted of three stages. The stages were public awareness, giving capacity and empowerment. The form of community empowerment involving public participation starting from planning, implementation and evaluation. Problems of community empowerment relating to maintained culture and customs from modernization influence, the attitude of society, human resources, accommodation tourist availability and promotion activities. In result, empowerment of communities through the development of tourism village in Penglipuran's village was giving implemented in socio-cultural resilience such as strengthening and some changes in the social and cultural values and environment.

Keywords: *Community Empowerment, Development of Tourism Village, Regional Socio-Cultural Resilience*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami berlangsungnya proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Wisata Penglipuran dan implikasinya terhadap ketahanan sosial budaya wilayah. Hasil penelitian diketahui bahwa proses pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Penglipuran berlangsung dalam tiga tahap yaitu tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pemberian daya. Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Adapun kendala-kendala dalam pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan usaha mempertahankan budaya dan adat istiadat dari arus modernisasi, sikap masyarakat, terbatasnya sumber daya manusia dan ketersediaan akomodasi wisata serta kurangnya kegiatan promosi. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata memberikan implikasi terhadap ketahanan sosial budaya wilayah berupa penguatan dan beberapa perubahan pada tata nilai sosial, budaya dan lingkungan.

Kata Kunci : *Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Desa Wisata, Ketahanan Sosial Budaya Wilayah*

PENGANTAR

Pulau Bali memiliki keragaman potensi wisata meliputi potensi wisata alam dan potensi wisata budaya disertai dengan keramahmatan masyarakatnya menjadikan Bali sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Arus kedatangan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri sangat lancar. Keberhasilan Bali dalam menarik wisatawan untuk berkunjung telah banyak memberi manfaat kepada masyarakat, melalui penciptaan lapangan kerja, mendorong ekspor hasil-hasil industri kerajinan serta sebagai sumber devisa daerah bahkan dalam beberapa dasa warsa sektor pariwisata telah mampu menjadi generator penggerak (*leading sector*) perekonomian daerah Bali (Pitana, 1999:45).

Kejenuhan terhadap bentuk wisata modern dan ingin kembali merasakan kehidupan di alam pedesaan serta berinteraksi dengan masyarakat dan aktifitas sosial budayanya menyebabkan berkembangnya pariwisata di daerah-daerah pedesaan yang dikemas dalam bentuk desa wisata. Pariwisata Inti Rakyat (PIR) dalam Hadiwijoyo (2012:68) mendefinisikan desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman dan kebutuhan wisata lainnya.

Pengembangan pariwisata pedesaan didorong oleh tiga faktor. *Pertama*, wilayah pedesaan memiliki potensi alam dan budaya yang relatif lebih otentik daripada wilayah

perkotaan, masyarakat pedesaan masih menjalankan tradisi dan ritual-ritual budaya dan topografi yang cukup serasi. *Kedua*, wilayah pedesaan memiliki lingkungan fisik yang relatif masih asli atau belum banyak tercemar oleh ragam jenis polusi dibandingkan dengan kawasan perkotaan. *Ketiga*, dalam tingkat tertentu daerah pedesaan menghadapi perkembangan ekonomi yang relatif lambat, sehingga pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal secara optimal merupakan alasan rasional dalam pengembangan pariwisata pedesaan (Damanik, 2013:69).

Salah satu kabupaten di Bali yang mengembangkan serta memanfaatkan potensi wisata alam dan budaya masyarakat yang dimiliki menjadi obyek dan daya tarik wisata adalah Kabupaten Bangli melalui Desa Wisata Penglipuran. Desa Wisata Penglipuran memiliki berbagai potensi wisata yang dijadikan daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung. Daya tarik yang dimiliki adalah pola tata ruang desa, arsitektur tradisional rumah penduduk, hutan bambu dengan beragam jenis pohon bambu di dalamnya, adat istiadat masyarakat lokal, makanan dan minuman tradisional serta hasil kerajinan bambu khas desa tersebut.

Pengembangan pariwisata di Desa Wisata Penglipuran tidak terlepas dari peran aktif masyarakat sekaligus sebagai usaha pemberdayaan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan dan melestarikan seni budaya. Menurut Kartasasmita (1997:11-12) pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat sendiri memerlukan

suatu proses, pengertian pemberdayaan sebagai suatu "proses" menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan tahapan untuk mengubah pihak yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan (Sulistiyani, 2004:77).

Tujuan pembangunan kepariwisataan melalui pemberdayaan masyarakat dapat terwujud apabila pembangunan tersebut bukan hanya pembangunan yang bersifat ekonomis semata, tetapi pembangunan yang bersifat sosial dan budaya. Diharapkan kepariwisataan yang berkembang melalui desa wisata tidak saja akan memperkuat ketahanan sosial budaya masyarakat setempat namun lebih luas lagi akan memperkuat ketahanan sosial budaya bangsa dan negara.

Lembaga Ketahanan Nasional mendefinisikan ketahanan sosial budaya sebagai "Keuletan dan ketangguhan bangsa dalam mewujudkan nilai-nilai budaya nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memantapkan jati diri dan integritas bangsa untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945" (Lemhannas, 1993:39). Parameter Ketahanan Sosial Budaya menurut Sukaya (2002: 71-72) terdiri atas asas-asas yang meliputi asas kesejahteraan dan keamanan, asas komprehensif integral/menyeluruh terpadu, asas mawas ke dalam dan mawas keluar serta asas kekeluargaan.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji berlangsungnya proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Wisata Penglipuran meliputi bentuk pemberdayaan masyarakat, kendala yang dihadapi selama proses pemberdayaan

dan hasil pemberdayaan serta mengidentifikasi implikasi pemberdayaan masyarakat tersebut terhadap ketahanan sosial budaya wilayah. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara observasi dan wawancara. Observasi dilakukan terhadap (1) aktivitas pengelola desa wisata dan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan desa wisata; (2) aktivitas masyarakat sehari-hari di lingkungan Desa Penglipuran dan (3) Kondisi fisik (tempat) penelitian meliputi lingkungan, obyek wisata, sarana dan prasarana wisata.

Bentuk wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur yang bersifat terbuka dimana subyek tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan wawancara. Partisipan yang dipilih dalam pengumpulan data melalui wawancara adalah orang yang dianggap tahu tentang proses pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Penglipuran sehingga mereka dapat memberikan masukan secara tepat tentang potensi, kendala dan strategi pengembangan daya tarik wisata di desa tersebut. Partisipan yang dipilih sebanyak 18 orang sebagai partisipan kunci meliputi unsur pemerintahan sejumlah 6 orang terdiri dari unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, Kepala Desa Kubu, *Bendesa* Adat Penglipuran, Ketua Lingkungan Penglipuran, dan Wakil Ketua Lingkungan Penglipuran, Ketua pengelola Desa Wisata Penglipuran, unsur pemuda dan tokoh masyarakat sejumlah 3 orang, warga Desa Penglipuran yang berprofesi sebagai pedagang, perajin dan penyedia *homestay* sejumlah 5 orang dan wisatawan sejumlah 3 orang.

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dari sejumlah literatur berupa buku, jurnal, majalah, koran ataupun karya tulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian, dokumentasi, memanfaatkan dokumen tertulis, gambar maupun berbentuk karya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti dan data dari internet. Metode analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Organisasi Desa Wisata Penglipuran

Organisasi pengelola Desa Wisata Penglipuran merupakan organisasi baru di bawah naungan *prajuru* adat dan dinas yang bertanggung jawab penuh kepada desa adat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan lembaga adat lainnya. Pada awalnya pengelolaan desa wisata dikelola langsung oleh desa adat, mengingat beban *prajuru* desa adat yang begitu berat berkaitan dengan

kegiatan dan permasalahan adat dan seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan serta permasalahan yang semakin kompleks maka dibentuklah organisasi khusus untuk mengelola desa wisata.

Organisasi ini diresmikan pada tanggal 1 Mei 2012 melalui Surat Keputusan Nomor: 556/557/DISBUDPAR/2012 oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli. Organisasi pengelola desa wisata dibentuk dari kelompok sadar wisata yang beranggotakan warga Desa Penglipuran dimana kelompok sadar wisata ini keberadaannya sudah ada di desa wisata tersebut sebelum terbentuknya organisasi pengelola desa wisata. Peran organisasi desa wisata adalah mengumpulkan ide-ide dari masyarakat melalui rapat-rapat desa, mulai dari perencanaan, pengelolaan dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata. Struktur organisasi Desa Wisata Penglipuran dapat dilihat pada gambar 1 berikut.

Gambar 1
Struktur Organisasi Desa Adat Penglipuran



Sumber :Sekretariat Desa Wisata Penglipuran, 2015

Proses Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Penglipuran berlandaskan falsafah agama Hindu yaitu *Tri Hita Karana* atau tiga penyebab keharmonisan, kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian. Falsafah ini diimplementasikan menjadi tiga aspek yaitu aspek *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan*, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, antar sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya.

Proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Wisata Penglipuran melalui tiga tahapan, meliputi tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan dan terakhir tahap pemberian daya.

Tahap pertama adalah tahap penyadaran dimana pada tahap ini dilakukan sosialisasi pembentukan desa wisata kepada masyarakat desa. Proses sosialisasi dilakukan oleh para tokoh desa melalui rapat-rapat desa dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembentukan desa wisata di lingkungan tempat tinggal mereka. Proses ini sejak awal tidak menemukan kendala yang berarti karena sebelum berstatus sebagai desa wisata, Desa Penglipuran merupakan suatu desa konservasi, yaitu suatu desa yang berusaha untuk melestarikan budaya, adat istiadat, hukum adat (*awig-awig*), dan tata cara kehidupan sehari-hari serta lingkungannya untuk diwariskan kepada generasi penerus agar tidak pudar seiring berjalannya waktu. Hal ini disampaikan oleh *Bendesa* Adat, I Wayan Supat sebagai berikut :

Kalau hambatan berkaitan dengan penawaran konsep dijadikan obyek wisata waktu itu tidak ada, berjalan begitu saja dan mulai dari tahun 90-an kita sudah menambah greget untuk upaya pelestarian lagi jadi ada pembenahan-pembenahan

..oh ini kurang baik ini sudah rusak...kita benahi, jadi dengan dijadikan obyek wisata semakin kuatlah kita memiliki upaya untuk melestarikan itu (wawancara tanggal 1 Desember 2015).

Upaya pelestarian di Desa Wisata Penglipuran dari segi fisik sudah dimulai dari awal tahun 1990, yaitu dengan mempertahankan keaslian bahan dan bentuk bangunan rumah warga yang ramah lingkungan yaitu *angkul-angkul* (pintu masuk) yang berbahan tanah dan beratap bambu, *paon* (dapur tradisional) yang dindingnya terbuat dari *gedeg* (anyaman bambu) dan *bale saka enem* yang juga beratap bambu. Untuk menjaga kenyamanan dan keasrian lingkungan, masyarakat setempat membuat taman di depan rumah mereka (*telajakan*) yang ditanami dengan aneka ragam tanaman bunga serta adanya pelarangan masuknya kendaraan bermotor di pekarangan induk pada jam-jam tertentu.

Desa Wisata Penglipuran telah lama dikenal memiliki potensi wisata alam dan wisata budaya berupa arsitektur bangunan yang khas, seiring berjalannya waktu masyarakat Desa Wisata Penglipuran berusaha untuk mengembangkan potensi wisata lain yang dikembangkan dan digali dari aktivitas kehidupan warga sehari-hari dan dikemas dalam bentuk atraksi wisata meliputi atraksi menganyam, membuat makanan tradisional, mengolah kopi, memanjat kelapa, *meodong* (adu ayam), *trancking* Penglipuran-Cekeng, dan melihat pengolahan minuman tradisional *loloh* cemcem. Atraksi ini ditawarkan kepada wisatawan dalam bentuk paket ataupun atraksi lainnya sesuai permintaan wisatawan.

Pembangunan desa wisata tidak lepas dari peran serta masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan adanya situasi dan kondisi masyarakat yang memiliki pola berpikir

yang sadar wisata. Penerapan sikap sadar wisata diharapkan akan mengembangkan pemahaman dan pengertian yang proporsional di antara berbagai pihak, sehingga pada gilirannya akan mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pariwisata (Nursaid, 2016:224). Pengembangan desa wisata di Desa Wisata Penglipuran mendapat dukungan dari masyarakat setempat yang terlihat dari keterlibatan mereka dalam menjaga dan merawat kebersihan dan kenyamanan lingkungan, melestarikan budaya baik secara fisik maupun non fisik serta partisipasi mereka dalam mendukung berbagai kegiatan atraksi wisata. Partisipasi masyarakat lainnya nampak dalam menyediakan berbagai akomodasi wisata yang dibutuhkan oleh wisatawan berupa tersedianya tempat penginapan atau *homestay* dan warung yang menyediakan berbagai macam makanan dan minuman serta aneka cinderamata.

Tahap kedua adalah tahap pengkapasitasan. Peran serta pemerintah sebagai salah satu *stakeholder* pariwisata sangat dibutuhkan pada tahap ini. Pemerintah dan masyarakat sebenarnya memiliki tanggung jawab yang sama dalam pengembangan pariwisata. Namun demikian, pemerintah seharusnya lebih berperan dalam mengajak, menggugah, dan menggairahkan masyarakat. Tugas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat (Saryani, 2013:51-52). Peranan pemerintah di Desa wisata Penglipuran dalam hal ini adalah meningkatkan sumber daya manusia melalui bimbingan, penyuluhan dan pelatihan di bidang kepariwisataan maupun kepada kelompok masyarakat yang memiliki usaha kerajinan di area obyek wisata. Untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang kepariwisataan, pemerintah melalui Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli Bidang Bimbingan dan Penyuluhan tiap tahun mengadakan program pelatihan kepada kelompok-kelompok sadar wisata yang ada di Bangli, selain itu pemerintah melalui dinas kesehatan dan dinas perindustrian dan perdagangan memberikan bantuan berupa bimbingan, penyuluhan dan pelatihan kepada kelompok perajin baik perajin bambu dan perajin minuman tradisional untuk meningkatkan kualitas hasil kerajinan mereka. Berikut ini adalah tabel 1, daftar pelatihan/bimbingan teknis yang pernah diikuti oleh kelompok Sadar Wisata Penglipuran.

Tabel 1
Daftar Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis
Desa Wisata Penglipuran

No.	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Pembekalan Pelayanan Prima	22 Oktober 2012
2.	Bimbingan Teknis Daya Pari-	1 Maret 2012
3.	wisata	Oktober 2013
4.	Seminar Pariwisata	Agustus 2014
5.	Bimbingan Pemanfaatan TIK dalam Pemasaran Pariwisata	Mei 2015
	Bimbingan Teknis Kapasitas Sumber Daya Pariwisata	

Sumber : Disbudpar Kab. Bangli Bidang Bimbingan dan Penyuluhan

Tahap ketiga yaitu tahap pemberian daya. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Penglipuran pada tahap ini dapat dilihat dari peran pemerintah dalam memberikan bantuan baik berupa dana pinjaman kepada kelompok masyarakat yang memiliki usaha maupun bantuan secara fisik untuk meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata. Bantuan secara fisik berupa pembuatan lahan parkir yang representatif, pengaspalan jalan, penataan kebun bambu, pembuatan toilet umum dan pembangunan rumah contoh.

Desa Wisata Penglipuran tercatat menerima bantuan dana sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) pada tahun 2014 dan Rp. 135.000.000,00 (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*) pada tahun 2015 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan sasaran penataan parkir, sedangkan bantuan dari pemerintah pusat Desa Wisata Penglipuran telah dua kali menerima bantuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata pada tahun 2012 dan tahun 2013. Bantuan ini digunakan untuk perbaikan sarana prasarana kesenian (gong/gamelan dan barong) senilai Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan untuk fasilitasi sarana kesenian (kostum tari) senilai Rp. 70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*).

Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Masyarakat

Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Penglipuran dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam program pengembangan desa wisata mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada tahap perencanaan masyarakat setempat selalu dilibatkan dalam pembicaraan mengenai program pengembangan desa wisata melalui rapat-rapat desa secara musyawarah mufakat.

I Nengah Moneng selaku ketua organisasi pengelola desa wisata menyampaikan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program pengembangan desa wisata sebagai berikut :

Pengelola membuat konsep-konsep, konsep-konsep ini kita cocokkan dengan travel agent atau agen-agen pariwisata, kita sosialisasikan juga kepada masyarakat, masyarakat per individu juga sekelompok

orang juga memberi masukan-masukan. Jadi kita, baik itu dari masyarakat, praktisi pariwisata, juga dari pemerintah, kita sendiri pengelola, desa adat, kita sering sharing (wawancara tanggal 14 Januari 2016).

Bentuk pemberdayaan masyarakat pada tahap pelaksanaan diwujudkan dengan bentuk keterlibatan masyarakat dalam menyediakan berbagai fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan wisatawan selama berada di destinasi wisata berupa atraksi wisata, warung yang menyediakan makanan, minuman dan cinderamata, *homestay* serta penggunaan tenaga kerja dari masyarakat setempat. Potensi wisata budaya yang dimiliki oleh Desa Wisata Penglipuran meliputi aktivitas kehidupan sehari-hari yang mengandung unsur kearifan lokal yang dikemas sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan sebagai atraksi wisata. Sumber daya budaya yang dikembangkan sebagai atraksi wisata di Desa Wisata Penglipuran meliputi seni tari, kerajinan, kegiatan dan cara hidup masyarakat lokal, mengunjungi tempat-tempat bersejarah, serta mencoba kuliner masyarakat setempat seperti terlihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2
Daftar Atraksi Wisata di Desa Wisata Penglipuran

No.	Nama Atraksi	Harga Jual (Rp)
1.	Tari Panyembrama	1.750.000/paket
2.	Tari Puspawresti	1.950.000/paket
3.	Bebarongan	2.300.000/paket
4.	Joged	2.300.000/paket
5.	Prembon	2.500.000/paket
6.	Wayang	5.000.000/paket
7.	Pembawa Bunga dengan Bunga	300.000/paket
8.	Menganyam	200.000/paket
9.	Membuat Jajan Bali	150.000/paket
10.	Mengolah Kopi	100.000/paket
11.	Memanjat kelapa	200.000/paket
12.	Meodong	200.000/paket
13.	Tracking Penglipuran – Cekeng	750.000/paket

Sumber : Sekretariat Desa Wisata 2015, diolah

Berdasarkan hasil observasi, diketahui dari jumlah total rumah yang ada di karang induk yaitu sebanyak 76 rumah 50 di antaranya mengembangkan usaha dengan membuka warung atau kios yang menjual makanan, minuman dan cinderamata khas Penglipuran atau khas Bali lainnya. Hampir semua warung di Desa Penglipuran menyediakan minuman tradisional khas Penglipuran yaitu *loloh* cemcem dan jajanan tradisional Bali seperti klepon. *Loloh* cemcem merupakan minuman asli Desa Penglipuran yang proses pembuatannya hanya ada di desa ini.

Warga juga menyediakan *homestay* sebagai sarana untuk menginap wisatawan. Terdapat empat tipe *homestay* dengan harga yang bervariasi. Tipe pertama disebut *guest house*, *guest house* ini merupakan hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, sebelum difungsikan sebagai *homestay*, *guest house* ini dulu dijadikan sebagai rumah contoh. *Guest house* terdiri dari tiga buah kamar yang dikelola langsung oleh pengelola desa wisata dengan harga sewa Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*)/hari. Tiga tipe *homestay* berikutnya dibedakan menjadi tipe A, B dan C. *Homestay* ini merupakan bagian dari rumah warga yang khusus direnovasi dan dibuat dengan nuansa rumah tradisional khas Bali, bersih, nyaman dan ramah lingkungan. *Homestay* tipe A dengan tarif Rp. 350.000,00 (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*)/hari, tipe B dengan tarif Rp. 250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*)/hari dan tipe C dengan tarif Rp. 200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*)/hari. Perbedaan tipe ini berdasarkan kesiapan dan fasilitas yang ada di dalam *homestay*. Adanya *homestay* ini tentu saja akan menambah penghasilan warga. Adapun pembagian hasil dari penyewaan *homestay* dijelaskan oleh I Nengah Moneng dalam wawancara berikut ini.

Homestay dikelola langsung oleh pengelola desa wisata, nanti pembagiannya dipotong dulu untuk biaya-biaya operasional, seperti breakfast, snack, kemudian dapat bersih, 80% ke pemilik, 15% ke pengelola dan 5% ke desa adat. Kenapa pengelola itu mengambil 15% karena dia yang bertanggung jawab, yang membuat administrasinya, siapa yang menginap, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, ada yang paspornya diminta dulu untuk membuat laporan (wawancara tanggal 19 Nopember 2015).

Proses pengembangan Desa Wisata Penglipuran melibatkan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja baik sebagai pengelola desa wisata, petugas kebersihan maupun tenaga kerja untuk pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata. Dari hasil penjualan tiket, sebesar 20% masuk ke kas pengelola desa wisata. Dana tersebut digunakan untuk biaya operasional termasuk di dalamnya menggaji personel yang bertugas, seperti misalnya penjaga *front office*, penjual tiket, petugas keamanan, tukang parkir, petugas kebersihan dan lain sebagainya. Demikian pula pada saat pembangunan ataupun perbaikan fasilitas akomodasi untuk mendukung sarana dan prasarana pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti pengaspalan jalan ataupun pemasangan paving pada lapangan parkir dan pembangunan yang dilakukan oleh desa adat misalnya untuk perbaikan pura, renovasi balai banjar, dan lain sebagainya dimana dalam pembangunan-pembangunan tersebut desa ini lebih mengutamakan pekerja dari warga setempat terutama dari warga yang kurang mampu yang dipekerjakan sebagai buruh dengan upah rata-rata Rp 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*)/hari.

Evaluasi program pengembangan desa wisata meliputi evaluasi kegiatan pelayanan wisata sehari-hari maupun kegiatan dalam

Tabel 3
Pemasukan per Tahun dari Retribusi Pengunjung Desa Wisata Penglipuran

No.	Tahun	Pendapatan Total (Rp)	Pendapatan Desa (Rp)
1.	2007	46.632.500	18.653.000
2.	2008	56.912.000	22.764.800
3.	2009	59.944.000	23.977.600
4.	2010	113.471.500	45.388.600
5.	2011	305.613.500	122.245.400
6.	2012	305.054.000	122.021.600
7.	2013	383.072.500	153.229.000
8.	2014	575.031.500	230.012.600

Sumber : Disbudpar Kab. Bangli Bidang Usaha, Jasa dan Sarana Pariwisata

event besar lainnya seperti *Festival Village*. Hasil evaluasi ini kemudian disampaikan di rapat-rapat desa yang dihadiri oleh pengelola desa wisata, *prajuru* desa adat dan masyarakat. Selain hasil evaluasi kegiatan, pengelola desa wisata juga mengumumkan dana hasil penjualan tiket selama sebulan kepada masyarakat.

Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Bangli, pembagian hasil penjualan tiket antara pemerintah daerah dengan desa adalah 60% ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli dan 40% diserahkan ke desa. Kemudian dari 40% yang masuk ke kas desa, 20% masuk ke kas desa adat dan 20% lagi ke pengelola desa wisata untuk dana operasional. Tabel 3 di atas juga menunjukkan peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke desa wisata tersebut setiap tahunnya.

Kendala-Kendala Pemberdayaan Masyarakat

Proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Desa Wisata Penglipuran menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut nampak dari sikap beberapa warga terutama dari kalangan generasi muda yang berusaha untuk memodifikasi bentuk rumahnya ke arah modern, hal ini tentu saja akan mengubah image/citra desa tradisional seperti yang disampaikan oleh I Nengah Moneng sebagai berikut :

Bagaimana masyarakat itu nantinya komitmennya terjaga terutama pada anak-anak muda. Sering saya berbicara kalau arsitektur itu rusak yang punya duit itu yang merusak, karena biasanya yang punya duit itu yang aneh-aneh cari perhatian, buat rumah yang aneh-aneh, Yang di Penglipuran saya bilang tolong mengerti sederhana tapi bermakn. Yang kita buat itu kita jaga, wajib ada angkul-angkul, bale saka nem, bale dapur tradisional adat, ada tempat sucinya, walaupun belum mencapai 100%, untuk stylenya angkul-angkul sudah 100%. Kita buat semacam kesepakatan itu, masih sytle Bali dalam arti sesuai dengan kebutuhan, ada unsur-unsur modernnya (wawancara tanggal 22 Nopember 2015).

Kendala lainnya berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap usaha dagang dan penataan lingkungan. Masih adanya masyarakat yang menjajakan dagangan dengan cara mengacung atau menawarkan dagangan dengan mendatangi wisatawan secara langsung, hal ini akan mengurangi kenyamanan wisatawan. Untuk mengatasi hal tersebut warga yang ketahuan masih menjajakan dagangan dengan cara mengacung akan dikenai sanksi adat yaitu dengan memberi sesajen untuk pembersih Pura. Demikian pula dengan kondisi beberapa bangunan rumah tradisional di Desa Wisata Penglipuran yang terlihat sudah mengalami kerusakan dan beberapa rumah tidak berpenghuni terlihat

tidak terawat. Peneliti mengamati beberapa atap *angkul-angkul* dan *paon* di beberapa rumah warga mengalami penurunan kualitas. Atap *angkul-angkul* dan *paon* ini terbuat dari bambu, daya tahan bambu berkisar antara 10 sampai dengan 20 tahun, lebih dari itu akan mengalami pelapukan sehingga memerlukan renovasi atau penggantian. Tentu saja penggantian bagian dari bangunan tersebut membutuhkan sejumlah dana, hal inilah yang mungkin menjadi kendala terutama bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Selain itu peneliti juga melihat sebagian atap-atap berbahan bambu tersebut ditumbuhi tanaman liar, sehingga mengurangi keindahan dan kerapihan bangunan.

Kendala pada sumber daya manusia dimana bimbingan dan penyuluhan sehubungan dengan pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangli selama ini masih sangat kurang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Tidak adanya pelatihan khusus kepada pemilik *homestay* serta kurangnya pemandu wisata dari masyarakat lokal. Demikian pula dengan kurangnya kualitas maupun kuantitas akomodasi wisata yang ada di Desa Wisata Penglipuran masih menjadi kendala bagi pengembangan desa wisata tersebut terutama tersedianya lapangan parkir, tersedianya toilet umum yang bersih dan nyaman serta berstandar internasional mengingat banyaknya wisatawan asing yang datang berkunjung serta belum adanya klinik kesehatan.

Kendala berkaitan dengan kegiatan promosi. Berkaitan dengan promosi I Nengah Moneng mengakui kelemahan yang ada, yang disampaikan sebagai berikut.

Promosi dari kita sendiri kurang greget, perlu menambah aktivitas untuk promosi (wawancara tanggal 14 Januari 2016).

Promosi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan harus lebih ditingkatkan hal ini disebabkan jalur wisata ke Desa Wisata Penglipuran bukan merupakan jalur basah sehingga kurang begitu diminati oleh *guide* atau pemandu wisatawan. Kurangnya promosi juga menyebabkan banyak wisatawan tidak mengetahui adanya atraksi wisata lain selain melihat *view* desa yang ada di desa wisata tersebut.

Hasil Pemberdayaan Masyarakat

Ada beberapa parameter yang dapat digunakan sebagai ukuran kesuksesan ketahanan sosial budaya. Menurut Lestari (2016:153) dalam penelitiannya mengatakan bahwa parameter kesuksesan ketahanan sosial budaya di Desa Wisata Pentingsari dapat diamati dari terbentuknya kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini diukur dari meningkatnya keberdayaan ekonomi dan keterampilan sebagai kualitas hidup masyarakat. Parameter lain dari meningkatnya ketahanan sosial budaya yaitu keberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Penglipuran sendiri menghasilkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, kemampuan promosi. Desa Wisata Penglipuran memiliki *website* yaitu www.penglipuran.net sebagai media untuk mempromosikan desa wisata mereka secara online, selain itu desa wisata ini juga mempromosikan desanya melalui brosur yang dibagikan kepada wisatawan yang datang ataupun melalui agen travel. Promosi lainnya yaitu dengan aktif mengikuti pameran pariwisata yang diadakan di kota-kota besar di Indonesia, mengikuti seminar pariwisata dan budaya yang sering diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

serta kegiatan promosi lain yaitu melalui kegiatan festival yang diberi nama “*Festival Village*” yang diadakan setiap tahun sekali dan sudah berlangsung sebanyak tiga kali sejak tahun 2013. Festival ini merupakan bentuk kemandirian Desa Wisata Penglipuran dalam mengadakan promosi karena tanpa bantuan dari pemerintah daerah.

Kedua, kemampuan untuk mengembangkan potensi wisata berupa atraksi wisata.

Ketiga, penyediaan akomodasi untuk wisatawan berupa warung makanan, minuman dan cinderamata serta *homestay*.

Keempat, pengembangan desa wisata memberikan manfaat ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat setempat. Manfaat langsung yaitu berupa tambahan penghasilan yang diperoleh dari penyewaan *homestay*, penjualan makanan, minuman, tanaman hias dan cinderamata, keterlibatan warga dalam atraksi wisata maupun sebagai perajin bambu dan perajin makanan dan minuman tradisional. Manfaat ekonomi secara tidak langsung diperoleh melalui desa, dimana sebagian penghasilan dari penjualan tiket masuk ke kas desa, dana yang diperoleh dari hasil penjualan tiket ini digunakan untuk pembangunan desa, seperti misalnya untuk perbaikan sarana ibadah, kegiatan-kegiatan upacara dan lain sebagainya.

Kelima, adanya perubahan mata pencaharian penduduk, banyak warga yang beralih menjadi perajin makanan, minuman tradisional dan perajin bambu, membuka usaha warung untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, dan pekerjaan lainnya untuk mendukung pengembangan desa wisata.

Keenam, kebersihan, kenyamanan dan keamanan lingkungan semakin terlihat hal ini

ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi wisatawan maupun bagi warga Penglipuran sendiri.

Ketujuh, adanya program dari pemerintah berkaitan dengan sektor pariwisata seperti perbaikan sarana dan prasarana pariwisata meliputi pemavingan lapangan parkir, pengaspalan jalan, pembuatan toilet umum, pembuatan rumah contoh dan penataan hutan bambu dari dinas pariwisata dan dinas pekerjaan umum, peningkatan sumber daya manusia melalui bimbingan dan penyuluhan.

Kedelapan, meningkatnya pelestarian hutan bambu, selain sebagai obyek wisata hutan bambu juga merupakan aset desa untuk memelihara keseimbangan lingkungan.

Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah

Implikasi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Wisata Penglipuran terhadap ketahanan sosial budaya wilayah berupa hal-hal sebagai berikut.

Pertama, pelestarian terhadap budaya dan adat istiadat. Dengan ditetapkannya sebagai desa wisata, arus kunjungan wisatawan baik lokal maupun manca negara cukup besar, hal ini tentu membawa perubahan dalam nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat. Menghadapi hal tersebut berbagai macam upaya dilakukan masyarakat untuk menjaga kelestarian budaya dan adat istiadatnya. Wujud dari upaya pelestarian yang mereka lakukan yaitu dengan mempertahankan bentuk tata ruang dan bangunan-bangunan tradisional khas desa khususnya bangunan di pekarangan induk, pelestarian terhadap seni budaya melalui seni tari, makanan dan minuman tradisional, seni kerajinan bambu, serta pelestarian hutan bambu. Upaya menjaga kelestarian budaya

dan adat istiadat selain dengan adanya sanksi adat yang keras juga tidak terlepas dari peranan tokoh-tokoh desa baik tokoh adat maupun dinas yang selalu memberi pengertian kepada masyarakat, selain itu adanya permintaan dari wisatawan untuk menyaksikan atau belajar seni Bali khususnya seni tari serta latihan seni dan tabuh yang rutin dilaksanakan warga desa khususnya oleh *Sekaa Teruna Teruni* turut menjaga kelestarian budaya mereka.

Kedua, perubahan cara hidup dan tata nilai. Perubahan cara hidup dan tata nilai yang bisa diamati yaitu meningkatnya partisipasi warga dalam kegiatan sosial. Hal ini merupakan dampak tidak langsung dari pariwisata. Dengan adanya pariwisata taraf hidup masyarakat semakin meningkat, banyak warga mengalami peningkatan pendapatan dengan cara berdagang ataupun usaha lain yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata. Salah satu bentuk partisipasi warga dalam kegiatan sosial adalah memberi sumbangan (iuran) kepada desa adat untuk pembangunan desa, seperti disampaikan oleh *Bendesa* Desa, I wayan Supat sebagai berikut:

Jadi tanah di masyarakat adat kami ini ikatan wilayahnya sangat kuat, sehingga pemerintah adat bisa minta iuran karena dulu mungkin senada dengan pasal 33 UUD 45, tanah, bumi, air dan kekayaan lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara, negara dalam hal ini desa adat sebagai republik kecil.....misalkan punya aset seperti pura kalau tidak punya uang kan harus minta iuran pada warga, karena desa adat ketika dia kekurangan dana bukan ke pemerintah minta dananya tapi ke masyarakat, karena sumber dana keuangan masyarakat itu dari iuran-iuran, dari tanah-tanah milik desa dan dari sumbangan pihak ketiga dengan catatan tidak mengikat (wawancara tanggal 1 Desember 2015).

Karena sudah mapan secara ekonomi tentu tidak sulit bagi pemerintahan desa dalam hal ini desa adat untuk meminta sumbangan atau iuran untuk mengisi kas desa yang digunakan untuk pembangunan-pembangunan desa.

Perubahan lain yang nampak adalah transformasi struktur mata pencaharian penduduk. Ada beberapa penyebab beralihnya mata pencaharian penduduk yang dulu mayoritas sebagai petani antara lain yaitu alih fungsi lahan yang sebelumnya ladang tempat untuk bercocok tanam sekarang digunakan sebagai tempat pemukiman akibat perkembangan jumlah penduduk. Disamping itu profesi petani bagi generasi muda dianggap kurang menjanjikan dari segi pendapatan, banyak generasi muda di Penglipuran yang bekerja sebagai awak kapal pesiar di luar negeri. Warga yang memiliki pendidikan rendah lebih memilih untuk menjadi buruh bangunan didukung banyaknya proyek pembangunan di desa mereka. Faktor lain terbukanya peluang bekerja di sektor pariwisata dengan memberikan jasa bagi wisatawan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Hal ini ditambah dengan naiknya permintaan konsumen akan produk minuman tradisional maupun kerajinan bambu yang semakin terkenal luas, menyebabkan minat masyarakat beralih profesi menjadi perajin minuman tradisional ataupun perajin bambu semakin meningkat.

Berkaitan dengan ketahanan pangan, untuk saat ini sektor pertanian masih merupakan salah satu tumpuan hidup bagi sebagian masyarakat Penglipuran baik sebagai petani di ladang maupun peternak. Karena kondisi geografis, Desa Penglipuran tidak memiliki areal persawahan. Hasil utama produk pertanian adalah pisang, ubi-

ubian dan coklat. Memanfaatkan produk utama pertanian lokal, masyarakat Desa Penglipuran mencoba mengembangkan makanan tradisional berbahan dasar ubi-ubian yang banyak dijumpai di warung-warung makanan baik untuk konsumsi sendiri maupun dijual kepada wisatawan. Dalam usaha untuk mengenalkan makanan ini ke masyarakat lebih luas, ibu-ibu warga Desa Penglipuran yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani sering menampilkan makanan tradisional berbahan dasar ubi-ubian pada saat ada pameran di desa mereka. Dengan demikian adanya pariwisata mendorong munculnya usaha pengolahan makanan untuk meningkatkan nilai tambah bagi produk pertanian lokal. Namun demikian ketergantungan bahan baku dari luar tampak dalam usaha pengolahan minuman tradisional yang dialami oleh produsen *loloh* cecem. Dampak dari pariwisata menyebabkan meningkatnya permintaan akan minuman tradisional ini. Bahan baku utama minuman *loloh* cecem adalah daun cecem, saat ini mereka mendatangkan daun cecem dari luar daerah Penglipuran karena daun cecem yang ditanam masyarakat setempat sudah tidak mencukupi lagi untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Perubahan tata nilai budaya. Kepariwisata di Desa Penglipuran dilihat dari sisi positif, merupakan salah satu cara untuk melestarikan budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. Di sisi lain pariwisata secara langsung maupun tidak langsung juga memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut dampak negatif nampak dari adanya warga yang memanfaatkan kedatangan wisatawan untuk meningkatkan pendapatan dengan jalan membuka warung/kios di pekarangan rumah mereka, dimana

menurut peraturan Desa Penglipuran, tidak diperkenankan membangun warung yang langsung terlihat oleh wisatawan dari luar pekarangan karena akan mengganggu pemandangan rumah-rumah tradisional, mereka diperkenankan membuka warung tetapi di dalam pekarangan rumah dan dibatasi dengan tembok. Mengenai hal ini, I Nengah Moneng menjelaskan sebagai berikut.

Sebenarnya warung itu tidak boleh mengganggu bangunan-bangunan tradisional, boleh di dalam tapi bagaimana, nah ini kita perlu ada semacam kesepakatan seperti apa misalnya tidak boleh menaruh barang dagangan itu di bale saka nem, kalau buka jangan sampai menutup view rumah-rumah adat, yang kedua tidak boleh seolah-olah lebih menonjolkan dagangan daripada rumah tradisionalnya....kalau warung minuman, makanan itu sebatas penataannya tidak mengganggu keaslian, kenyamanan, seni-seni dari bangunan tradisional itu, masih ada toleransi sedikit (wawancara tanggal 22 Nopember 2015).

Dari hasil observasi beberapa rumah terlihat menjajakan dagangannya secara terbuka sehingga menutupi *view* rumah tradisional dari depan serta menaruh barang dagangan di *bale saka enem*. Adapun fungsi dari *bale saka enem* adalah sebagai tempat sakral untuk melangsungkan upacara-upacara *Yadnya*, seperti upacara *pawiwahan* (pernikahan), upacara *matatah* (potong gigi), *otonan*, tempat meletakkan mayat sebelum dikubur dan upacara *Yadnya* lainnya.

Ketiga, dampak terhadap kehidupan sehari-hari dan lingkungan, yaitu (1) dampak dari kunjungan wisatawan pada saat-saat tertentu menimbulkan kepadatan pengunjung yang berdampak pada kurangnya lahan parkir sehingga terjadi kemacetan di beberapa titik akibat banyaknya kendaraan yang memasuki

area obyek wisata. Dampak bagi lingkungan dengan adanya kepadatan pengunjung terlihat banyaknya sampah berserakan di sembarangan tempat akibat kurangnya kesadaran pengunjung akan kebersihan lingkungan serta rusaknya beberapa tanaman bunga di *telajakan* akibat digunakan sebagai latar foto bagi para pengunjung. Untuk mengantisipasi masalah tersebut desa ini telah menyediakan beberapa tempat sampah di tempat-tempat strategis, pemasangan papan peringatan yang bertuliskan “Dilarang Buang Sampah Sembarangan”, dan juga menambah tenaga pembersih untuk membersihkan fasilitas umum. (2) penggunaan lahan. Dampak kegiatan pariwisata terhadap lingkungan lainnya adalah alih fungsi lahan. Selain karena berkembangnya jumlah penduduk, alih fungsi lahan lainnya terjadi karena peningkatan jumlah pengunjung tiap tahun yang berdampak pada ketidakmampuan daerah tersebut untuk menampung jumlah kendaraan, solusi dari masalah ini ada pembukaan lahan parkir baru. Lahan parkir di Desa Wisata Penglipuran yang digunakan sekarang ini sebelumnya adalah tempat pemukiman warga dan sebagian lagi adalah ladang/tegalan milik desa adat dan milik warga. Pindahan rumah warga ataupun pembukaan ladang yang lahannya kemudian digunakan sebagai tempat parkir kendaraan tentu berdampak pada berkurangnya lahan bercocok tanam bagi masyarakat setempat. Hal positif yang bisa dijumpai di Desa Penglipuran berkaitan dengan lahan adalah tanah milik adat maupun warga tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan dengan warga di luar Lingkungan Penglipuran kecuali antara warga Penglipuran itu sendiri. Hal ini sudah diatur di dalam hukum adat atau *awig-awig*. Aturan tersebut secara tidak langsung merupakan bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai sosial

budaya masyarakat setempat dari pengaruh budaya asing.

Salah satu upaya untuk menjaga kelestarian alam lingkungan, masyarakat Desa Penglipuran berusaha menggunakan pupuk organik untuk menyuburkan tanaman. Selain pupuk organik dari kotoran hewan ternak, akhir-akhir ini masyarakat memanfaatkan daun-daun bambu yang sudah kering dari hutan bambu dan diolah untuk digunakan sebagai pupuk tanaman. Menurut penuturan I Nengah Moneng pupuk yang berasal dari daun bambu ini sangat bagus karena mengandung zat anti jamur. Usaha pengolahan pupuk ini dilakukan masyarakat setempat yang berlokasi di sebelah selatan desa di belakang *karang memadu*. Di samping itu warga juga memanfaatkan hasil limbah pengolahan *loloh* cemcem untuk menyuburkan tanaman.

Keempat, penguatan kehidupan beragama. Masyarakat Desa Penglipuran sehari-hari tetap melakukan aktivitas keagamaan seperti biasa tidak terpengaruh dengan adanya aktivitas pariwisata. Dalam sebulan minimal empat kali warga melakukan persembahyangan ke pura. Pada saat melaksanakan upacara keagamaan, warga sibuk menyiapkan segala keperluan untuk kepentingan upacara seperti *banten* atau menyiapkan sesaji khusus yang akan dibawa ke pura, pada saat tersebut banyak warga yang menghentikan aktivitas sehari-hari seperti misalnya berjualan dengan menutup warung. Dalam pelaksanaan upacara keagamaan biasanya ada pengarahannya dari *Bendesa* Adat kepada warga. Di sela-sela pengarahannya diselipkan juga pesan kepada warga kaitannya dengan pariwisata dimana warga dihimbau untuk selalu menjaga nilai moral, budaya dan adat istiadat dalam bentuk sikap perilaku sehari-hari. Selain itu warga

juga dipesan untuk tidak cepat terpengaruh oleh budaya asing yang masuk melalui pariwisata.

Kelima, terjaganya nilai-nilai kekeluargaan. Sikap kekeluargaan yang tinggi di antara warga Desa wisata Penglipuran diwujudkan dalam aktivitas sehari-hari dalam bentuk gotong-royong dan partisipasi aktif lainnya di berbagai kegiatan sosial. Sikap kekeluargaan ini dapat dilihat dengan dibangunnya berbagai fasilitas umum dengan menggunakan tenaga kerja dari masyarakat setempat. Partisipasi aktif masyarakat yang menunjukkan kebersamaan selain untuk pembangunan fisik juga ditujukan untuk pembangunan non fisik hal ini nampak dari kehadiran warga pada saat hari-hari penting umat agama Hindu seperti upacara *ngaben* masal, kegiatan olahraga, rapat-rapat desa, dan pembinaan kepada *Sekaa Teruna Teruni*. Unsur kekeluargaan antar warga yang tinggi nampak juga dari segi penataan rumah dengan adanya *betelan* atau jalan tembus antar rumah warga dari ujung utara hingga selatan, mencerminkan bahwa masyarakat Penglipuran merupakan masyarakat sosial yang selalu hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya.

SIMPULAN

Berdasar penjelasan tersebut di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

Pertama, Desa Wisata Penglipuran merupakan salah satu desa wisata di Bali dengan daya tarik berupa pola tata ruang desa dan arsitektur bangunan tradisional yang khas, adat istiadat yang cukup unik dan kekayaan alam berupa hutan bambu. Pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan desa wisata merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat melalui

pengembangan desa wisata di Penglipuran melalui tiga tahapan yaitu tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan dan tahap pemberian daya. Kegiatan penyadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga budaya dan adat istiadat dengan adanya pariwisata harus terus-menerus dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat. Hal ini untuk menjaga kelestarian budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai moral yang diwariskan oleh para leluhur sehingga dapat diturunkan kepada generasi mendatang dan menjadi benteng bagi masuknya pengaruh budaya asing terutama yang tidak sesuai dengan kepribadian lokal.

Kedua, pemerintah sebagai salah satu *stakeholder* pariwisata diharapkan untuk lebih meningkatkan peranannya terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pembinaan teknis tentang pengelolaan obyek wisata dan pembinaan terhadap usaha-usaha kerajinan yang dilakukan masyarakat setempat. Peranan pemerintah juga sangat dibutuhkan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sarana akomodasi obyek wisata, khususnya rehabilitasi sarana dan prasarana utama yang kondisinya sudah rusak serta pembangunan sarana-sarana baru untuk melengkapi kebutuhan wisatawan seperti misalnya klinik kesehatan. Selain itu pihak pengelola desa wisata dan desa adat untuk lebih membuka diri dengan mengembangkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini swasta untuk meningkatkan potensi obyek wisata serta kualitas akomodasi wisata dengan tetap mematuhi hukum adat yang berlaku.

Ketiga, masyarakat setempat diharapkan selalu menjaga kebersihan, kerapian, keasrian, kenyamanan, dan keamanan lingkungan. Usaha-usaha yang dapat dilakukan yaitu merawat bangunan-bangunan tradisional yang

dimiliki dengan memperhatikan kebersihan bangunan rumah dan lingkungan sekitarnya, memperbaiki bangunan-bangunan rumah yang sudah mengalami kerusakan dan tidak terlalu menonjolkan barang dagangan sehingga menutupi *view* bangunan rumah tradisional mereka.

Keempat, dalam hal kegiatan promosi yang dilakukan oleh pengelola desa wisata baik melalui internet maupun brosur agar dicantumkan lebih detail tentang kegiatan atraksi wisata yang ada di Desa Wisata Penglipuran dan meningkatkan lagi kegiatan-kegiatan promosi seperti menempatkan brosur ditempat-tempat strategis seperti bandara, hotel, pusat perbelanjaan dan restoran serta meningkatkan kerjasama dengan agen travel baik dalam maupun luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, J., 2013, *Pariwisata Indonesia Antara Peluang dan Tantangan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hadiwijoyo, S.S., 2012, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Kartasasmita, G., 1997, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*, Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Lemhannas, 1993, *Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, Pendukung GBHN 1993*, Jakarta.
- Lestari, G., 2016, Partisipasi Pemuda Dalam Mengembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat Untuk Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Pentingsari, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, D.I. Yogyakarta),

Jurnal Ketahanan Nasional, Volume 22, No. 2, Hal. 137-157.

Nursaid, A., 2016, Peran Kelompok Batik Tulis Giriloyo Dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi Di Dusun Giriloyo, Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta), *Jurnal Ketahanan Nasional*, Volume 22, No. 2, Hal. 217-236.

Pitana, I G., 1999, Pelangi Pariwisata Bali, Denpasar, *Bali Post*.

Saryani, 2013, Pariwisata Dan Ketahanan Sosial Budaya, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Volume 19, No. 1, Hal.47-55.

Sukaya, E.Z, Kaelan (M.S.), Zubaidi, Ahmad, Kaelan, 2002, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Paradigma.

Sulistiyani, A.T., 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media.

Dokumen

- Disbudpar, 2007-2014, *Pemasukan per Tahun dari Retribusi Pengunjung Desa Wisata Penglipuran*, Kabupaten Bangli.
- Disbudpar, 2011-2015, *Program Kegiatan Bidang Bina Obyek*, Kabupaten Bangli.
- Disbudpar, 2014-2015, *Penerima Bantuan PNPM Mandiri Pariwisata*, Kabupaten Bangli.
- Disbudpar, 2012-2015, *Daftar Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Desa Wisata Penglipuran*, Kabupaten Bangli.

Wawancara

1. I Wayan Supat
2. I Nengah Moneng